

DARI BPUPKI KE PANCASILA: REFLEKSI SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Maulana Dwi Kurniasih
kurniasihd6@gmail.com
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Muhammad Isma'il
Muhammad.ismail@uinjkt.ac.id
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract: This article explores the historical journey of the formation of the Indonesian state, starting from the role of BPUPKI (The Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence) to the formulation of Pancasila as the nation's foundational ideology. BPUPKI, established in 1945, played a key role in preparing Indonesia's independence and formulating the inclusive foundations of the state, including through the Jakarta Charter. Pancasila, with its five principles, was designed to unite Indonesia's diverse cultures, religions, and ethnicities. This article uses a mixed-methods approach, including historical analysis of primary and secondary sources to understand the process of Pancasila's formulation, as well as qualitative research on the practice of civic education. The focus of this study is on how Pancasila's values are taught and internalized by students, as well as the challenges faced in maintaining the relevance of civic education amidst the development of globalization and technology. The article concludes that the foundational ideology, Pancasila, plays an important role in maintaining Indonesia's pluralistic unity while balancing the preservation of traditional values and accommodating the changing times in civic education, ensuring that these principles remain relevant and strengthen the unity of the Indonesian nation amid ongoing global dynamics.

Keywords: BPUPKI, Pancasila, Civic Education, Social Cohesion, Cultural Diversity

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi perjalanan sejarah pembentukan negara Indonesia, mulai dari peran BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) hingga perumusan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. BPUPKI, yang dibentuk pada tahun 1945, memainkan peran kunci dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar-dasar negara yang inklusif, termasuk melalui Piagam Jakarta. Pancasila, dengan lima prinsipnya, dirancang untuk mempersatukan keragaman budaya, agama, dan etnis Indonesia. Artikel ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*), yang mencakup analisis historis melalui kajian sumber primer dan sekunder untuk memahami proses perumusan Pancasila, serta penelitian kualitatif terhadap praktik pendidikan kewarganegaraan. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diajarkan dan diinternalisasi oleh siswa, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga relevansi pendidikan kewarganegaraan di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi. Artikel ini menyimpulkan ideologi dasar negara, Pancasila memegang peranan penting dalam memelihara persatuan Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Pancasila dan mengakomodasi perubahan zaman dalam pendidikan kewarganegaraan, agar prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan mampu memperkuat kesatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Kata Kunci: BPUPKI, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Kohesi Sosial, Keragaman Budaya

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu bangsa seringkali merupakan proses yang kompleks dan penuh gejolak, yang dibentuk oleh peristiwa sejarah, perjuangan ideologi, dan aspirasi rakyatnya. Bagi Indonesia, perjalanan dari penjajahan kolonial ke kemerdekaan ditandai dengan perdebatan sengit, kompromi, dan pencarian identitas yang dapat menyatukan keberagaman budaya, agama, dan etnis (Goh, 2007). Pembentukan Panitia Investigasi untuk Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tahun 1945 merupakan momen penting dalam perjalanan ini, yang meletakkan dasar bagi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan ideologi dasar Negara Pancasila (Nurjanah et al., 2021; Wirayuda, 2024). Jalan menuju kemerdekaan tidak tanpa tantangan. Pendudukan Jepang, yang awalnya menjanjikan pembebasan dari kolonialisme Belanda, membawa kenyataan keras yang menguji ketahanan rakyat Indonesia. Perumusan Piagam Jakarta, yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam dokumen dasar negara, memicu perdebatan sengit dan menyoroti ketegangan antar komunitas agama yang berbeda. Kompromi yang akhirnya tercapai, yang menghasilkan pembentukan Pancasila, menekankan pentingnya inklusivitas dan pluralisme dalam pembangunan negara. (M.S, Kaelan, 2010). Namun, tantangan untuk mempertahankan persatuan ini terus berlanjut hingga era modern. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan polarisasi politik yang meningkat telah mempersulit tugas untuk membangun identitas nasional yang kohesif.

Dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, menekankan pentingnya mengontekstualisasikan Pancasila dalam narasi sejarah untuk memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsipnya. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan toleransi dan kohesi sosial, kurikulum pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan sikap toleransi dan tanggung jawab kewarganegaraan (Fortuna & Khadir, 2022). Tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan yang lebih luas di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan strategi pembelajaran kooperatif dan pendidikan karakter untuk mempromosikan keterlibatan demokratis dan ketahanan terhadap pengaruh negatif (Boonen et al., 2017).

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, menghadapi tantangan signifikan dalam menyesuaikan diri dengan munculnya teknologi digital. Meskipun menawarkan jalan baru untuk keterlibatan kewarganegaraan, teknologi ini juga menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan konten yang terpolarisasi, yang memperumit pemahaman siswa terhadap isu-isu kewarganegaraan. Selain itu, meningkatnya keberagaman demografis di kalangan siswa memerlukan evaluasi kembali pendekatan pendidikan kewarganegaraan untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut inklusif dan mencerminkan pengalaman beragam siswa. Pertanyaan penelitian yang mendasari artikel ini adalah: Bagaimana suatu bangsa dengan keberagaman yang begitu kaya dapat mempertahankan kohesi sosial dan rasa tujuan bersama? Apa peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial pada warganya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya refleksi sejarah, tetapi juga masalah mendesak di dunia yang berkembang pesat. Artikel ini mengeksplorasi konteks sejarah proses pembangunan bangsa Indonesia, kompromi ideologis yang membentuk Pancasila, dan peran abadi pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan keharmonisan dan identitas nasional dalam masyarakat yang beragam..

METODE

Artikel ini didorong oleh beberapa asumsi kunci. *Pertama*, konteks sejarah proses pembangunan bangsa Indonesia, khususnya peran BPUPKI dan perumusan Pancasila, memberikan wawasan penting mengenai tantangan dalam membangun persatuan nasional di masyarakat yang beragam. *Kedua*, diasumsikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, apabila diintegrasikan dengan efektif ke dalam pendidikan kewarganegaraan, dapat mempromosikan toleransi, kohesi sosial, dan rasa identitas nasional di kalangan siswa. *Ketiga*, diasumsikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi memerlukan pendekatan inovatif dalam pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pemikiran kritis, literasi digital, dan kurikulum inklusif.

Untuk menguji asumsi-asumsi ini, studi ini menggunakan desain metode campuran yang menggabungkan analisis sejarah dengan penelitian pendidikan kontemporer. Analisis sejarah menggunakan sumber primer dan sekunder untuk menggali kompromi ideologis yang membentuk Pancasila dan peran BPUPKI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konteks sejarah ini menyediakan dasar untuk memahami relevansi abadi Pancasila di Indonesia kontemporer. Komponen penelitian kontemporer melibatkan studi kualitatif terhadap kurikulum dan praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diajarkan dan diinternalisasi oleh siswa. Survei dan wawancara dengan pendidik dan siswa digunakan untuk menilai efektivitas pendekatan yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Sejarah Pembentukan Negara Indonesia

Posisi Jepang dalam Perang Pasifik ditandai dengan ekspansionisme agresif dan pembentukan rezim militer di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selama pendudukan dari tahun 1942 hingga 1945, Jepang berusaha untuk mempromosikan gagasan "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya," yang secara tersurat bertujuan untuk membebaskan negara-negara Asia dari kekuasaan kolonial Barat sambil mengeksploitasi sumber daya mereka untuk upaya perang Jepang (Yoshida, 2008). Periode ini ditandai dengan upaya propaganda politik dan budaya yang signifikan dari pemerintah Jepang, yang bertujuan untuk membangun rasa persatuan di antara negara-negara Asia melawan imperialisme Barat. Namun, kenyataan brutal dari pendudukan, termasuk kerja paksa dan mobilisasi perempuan ke dalam rumah bordil militer, sangat meruntuhkan klaim kebaikan Jepang.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk pada Maret 1945 oleh penjajah Jepang, merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan dasar-dasar pemerintahan sendiri, yang memainkan peran krusial dalam membentuk identitas nasional dan persatuan di antara para pemimpin serta intelektual Indonesia. Hal ini sangat penting bagi gerakan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI signifikan tidak hanya karena mengakui aspirasi Indonesia untuk merdeka, tetapi juga memberikan platform untuk diskusi di antara tokoh-tokoh nasionalis. Selama dua sidangnya, komite ini fokus pada berbagai aspek pemerintahan, termasuk: prinsip-prinsip negara, konstitusi, dan struktur politik Indonesia. Musyawarah ini membantu membentuk dasar-dasar ideologis Indonesia yang mengarah pada pembentukan UUD 1945.

Salah satu pencapaian BPUPKI adalah inklusivitasnya, dengan perwakilan dari berbagai latar belakang etnis dan politik, yang membantu menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap proses kemerdekaan. Hal ini sangat penting di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman. Komite ini berhasil menyatukan berbagai daerah dan kelompok etnis, yang berkontribusi pada persatuan nasional yang lebih kokoh, yang terbukti penting dalam geopolitik pasca-perang. Upaya komite ini berpuncak pada penyusunan Konstitusi Indonesia yang segera diadopsi setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kerangka hukum ini menjadi dasar negara yang baru merdeka, yang mengakui demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia (Fauzan, 2019; Gandhi, 2020). Selain itu, warisan BPUPKI diteruskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang bertugas mengimplementasikan keputusan-keputusan BPUPKI dan mengawasi transisi Indonesia menuju kemerdekaan penuh.

Komite Sembilan (BPUPKI) juga memainkan peran kunci dalam perumusan Piagam Jakarta, dokumen penting dalam perkembangan konstitusi Indonesia. Piagam Jakarta, yang disusun pada 1945, bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka hukum negara. Pembuatan Piagam Jakarta dipengaruhi oleh demografi Indonesia yang kompleks, termasuk populasi Muslim yang besar dan minoritas Kristen yang signifikan, terutama di Indonesia Timur. Keberagaman ini menyebabkan perdebatan dan negosiasi sengit: pemimpin-pemimpin Islam berusaha untuk meletakkan dasar negara yang baru dalam nilai-nilai Islam. Kelompok non-Muslim, khususnya dari Indonesia Timur, menentang inklusi prinsip-prinsip Islam. Negosiasi komite ini akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yang mengatasi kekhawatiran baik dari faksi Muslim maupun non-Muslim.

Piagam Jakarta, yang dirumuskan pada 22 Juni 1945, telah menjadi titik fokus kontroversi dalam lanskap politik dan ideologi Indonesia, terutama terkait dengan implikasinya terhadap ideologi negara Pancasila. Piagam tersebut pada awalnya mencakup sebuah pasal yang mewajibkan penerapan hukum Islam bagi umat Muslim, yang memicu perdebatan signifikan di antara berbagai pihak dalam masyarakat Indonesia. Kontroversi ini terutama berkisar pada ketegangan antara nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler, yang telah membentuk wacana mengenai identitas nasional dan pemerintahan Indonesia. Piagam Jakarta dipandang sebagai kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 80% responden mendukung Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara Indonesia, sementara sekitar 20% mendukung kembalinya Piagam Jakarta, menganggapnya sebagai representasi yang lebih otentik dari identitas Islam Indonesia. Perpecahan ini menyoroti perjuangan yang terus berlangsung antara mereka yang ingin melihat prinsip-prinsip Islam terintegrasi dalam ideologi negara dan mereka yang lebih memilih pendekatan sekuler, seperti yang tercermin dalam Pancasila yang direvisi pasca-kemerdekaan.

Perumusan awal Pancasila, yang menggantikan pasal pertama Piagam Jakarta dengan pernyataan yang lebih netral mengenai kepercayaan kepada Tuhan, dipersepsikan oleh banyak kelompok Islam sebagai sebuah kekalahan. Kelompok-kelompok ini berargumen bahwa penghilangan kewajiban untuk menerapkan hukum Islam telah meringgirkan peran Islam dalam negara. Bahasa asli Piagam Jakarta dipandang sebagai kerangka yang lebih inklusif bagi umat Islam, dan revisinya telah menimbulkan perasaan kehilangan hak di antara beberapa faksi Islam yang terus memperjuangkan pemulihannya. Hal ini telah menghasilkan interaksi yang kompleks antara kompromi dan radikalisme dalam gerakan politik Islam di Indonesia, di mana

beberapa faksi mendorong kembalinya Piagam Jakarta sementara yang lain menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kontroversi seputar Piagam Jakarta juga mencerminkan konflik ideologis yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia, terutama mengenai hubungan antara Islam dan negara. Teks asli Piagam Jakarta menekankan kewajiban umat Islam untuk mematuhi hukum Islam, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin non-Muslim tentang kemungkinan dampaknya terhadap minoritas agama. Ketakutan akan peminggiran ini telah berkontribusi pada perdebatan yang terus berlangsung tentang peran Islam dalam pemerintahan Indonesia dan interpretasi Pancasila sebagai ideologi nasional yang menyatukan.

Konteks historis perumusan Piagam Jakarta dan revisinya menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan identitasnya sebagai negara dengan mayoritas Muslim dengan aspirasi untuk menjadi masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Warisan Piagam Jakarta terus mempengaruhi diskusi kontemporer mengenai integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka politik Indonesia, seperti yang tercermin dalam seruan berkelanjutan dari kelompok-kelompok Islam tertentu untuk peran yang lebih jelas dari Syariah dalam pemerintahan. Perjuangan ideologis antara mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional sekuler dan mengakomodasi prinsip-prinsip Islam tetap menjadi isu yang kontroversial dalam politik Indonesia hingga saat ini.

Perumusan Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia sangat dipengaruhi oleh kontribusi tokoh-tokoh kunci seperti Muhammad Yamin, Sukarno, dan Mohammad Hatta. Masing-masing membawa perspektif unik yang membantu membentuk prinsip-prinsip panduan bangsa ini. Muhammad Yamin berperan penting dalam merumuskan dasar filosofis Pancasila. Penekanannya pada nasionalisme dan persatuan sangat sejalan dengan perjuangan Indonesia untuk merdeka. Visi Yamin mengusulkan identitas nasional yang kohesif dan ideologi negara yang dapat menyatukan kelompok etnis dan agama yang beragam di negara ini (Lubis & Hasudungan, 2022; Lagut, 2020).

Sebagai presiden pertama Indonesia, Sukarno mengembangkan Pancasila lebih lanjut, mengintegrasikannya ke dalam kerangka politik dan sosial negara. Pidato terkenalnya pada 1 Juni 1945 menguraikan lima prinsip Pancasila, yang menekankan: nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sukarno memandang Pancasila bukan hanya sebagai konstruksi ideologis, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mempromosikan persatuan dan mencegah fragmentasi sosial (Razuni, 2023). Kepemimpinannya memastikan bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai seluruh rakyat Indonesia, membina rasa identitas kolektif. Mohammad Hatta, salah satu pendiri Indonesia, sangat berkomitmen pada demokrasi dan keadilan sosial, dua prinsip inti Pancasila. Visi Hatta menekankan sistem demokrasi di mana warga negara berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, memastikan bahwa cita-cita Pancasila dapat diterapkan secara praktis (Barton et al., 2021). Mohammad Hatta, seorang pendiri Indonesia, sangat berkomitmen pada demokrasi dan keadilan sosial, dua prinsip inti Pancasila. Visi Hatta menekankan sistem demokrasi di mana warga negara berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, memastikan bahwa cita-cita Pancasila diterapkan secara praktis (Barton et al., 2021).

Kemunculan Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia merupakan hasil dari kompromi ideologis di antara berbagai faksi. Proses ini melibatkan sintesis berbagai perspektif untuk mengakomodasi lanskap sosial, politik, dan budaya negara yang kompleks. Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 meletakkan dasar bagi Pancasila dengan menyajikan lima prinsip inti. Pemahamannya tentang pluralisme Indonesia memungkinkan dia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dengan cara yang akan

diterima oleh berbagai kelompok etnis dan agama, mempromosikan identitas nasional yang bersatu (Ningsih & Ndonga, 2024; Agussalim et al., 2023). Prinsip netralitas agama dalam prinsip pertama Pancasila dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada agama tunggal yang mendominasi narasi nasional Indonesia. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun persatuan di antara komunitas agama yang beragam di negara ini (Wibowo, 2023). Fokus Yamin pada nasionalisme dan persatuan, bersama dengan penekanan Hatta pada keadilan sosial dan demokrasi, membentuk Pancasila sebagai ideologi yang komprehensif. Kompromi ideologis ini berusaha menyeimbangkan hak individu dengan kesejahteraan kolektif dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila membimbing negara menuju keadilan dan kemakmuran (Dewi, 2024; Lumbangaol, 2021). Perumusan Pancasila ditandai dengan negosiasi antara berbagai kelompok politik dan sosial, yang menghasilkan sintesis kolektif. Pancasila muncul sebagai ideologi yang dinamis dan dapat beradaptasi yang mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berubah, sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip dasarnya (Ridwan, 2017; Rasdi, 2020).

Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar bagi Indonesia yang mengakomodasi keberagaman agama dan budaya bangsa ini. Akomodasi ini tercapai melalui lima prinsipnya, yang mencerminkan komitmen terhadap pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial, sehingga membangun rasa persatuan di antara populasi Indonesia yang beragam. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," menetapkan kerangka yang menghormati berbagai keyakinan agama yang ada di Indonesia. Prinsip ini tidak memihak pada agama tertentu, tetapi lebih mengakui keberadaan berbagai agama, mendorong rasa saling menghormati dan berdampingan antara komunitas agama yang berbeda (Labobar, 2024; Dawani et al., 2024). Dengan menanamkan prinsip ini dalam ideologi nasional, Pancasila mendorong warga negara untuk memeluk identitas agama mereka sambil membina identitas nasional kolektif yang melampaui keyakinan individu (Wasino et al., 2019). Pendekatan ini sangat signifikan di negara yang di dalamnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli hidup berdampingan, karena mengurangi potensi konflik agama dan mempromosikan keharmonisan (Rosa & Nawawi, 2023; Yusuf, 2023).

Prinsip kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya hak asasi manusia dan martabat bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang budaya atau agama mereka. Prinsip ini mendukung keadilan sosial dan kesetaraan, yang sangat penting dalam masyarakat multikultural (Taopik, 2023; Sugito et al., 2021). Dengan mempromosikan gagasan bahwa setiap individu berhak dihormati dan diperlakukan dengan adil, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing negara menuju inklusivitas dan kesetaraan, dengan demikian mengakomodasi praktik budaya dan tradisi yang beragam di Indonesia (Izza, 2022; Faizah et al., 2023). Prinsip "Persatuan Indonesia" semakin memperkuat gagasan tentang kohesi nasional di tengah keragaman. Prinsip ini menekankan pentingnya solidaritas nasional dan identitas kolektif, mendorong warga negara untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas Indonesia yang lebih besar, meskipun berasal dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda (Jayanti & Sowiyah, 2023; Hindradjat et al., 2022). Prinsip ini sangat penting dalam membangun rasa memiliki dan persatuan, karena selaras dengan semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), yang merangkum inti dari identitas multikultural Indonesia (Rosa & Nawawi, 2023; Kusuma & Susilo, 2020). Demokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip keempat, "Demokrasi yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mempromosikan pemerintahan partisipatif yang

menghormati suara seluruh warga negara. Prinsip ini memungkinkan inklusi berbagai perspektif budaya dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan populasi yang beragam (Wasino et al., 2019; Faizah et al., 2023). Dengan mendorong demokrasi deliberatif, Pancasila memberdayakan warga dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam dialog dan berkontribusi pada pemerintahan negara, sehingga memperkuat kohesi sosial dan saling pengertian (Yusuf, 2023; Wirasena et al., 2023).

Akhirnya, prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mencakup komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan yang adil bagi setiap warga negara, tanpa memandang afiliasi budaya atau agama mereka. Prinsip ini sangat relevan dalam menangani ketimpangan sosial-ekonomi yang mungkin timbul dalam masyarakat yang beragam (Taopik, 2023; Sugito et al., 2021). Dengan memprioritaskan keadilan sosial, Pancasila bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana semua warga negara dapat berkembang, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan kemajuan kolektif (Izza, 2022; Faizah et al., 2023).

Pancasila, sebagai filosofi dasar negara Indonesia, secara jelas ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29, yang mengatur kebebasan beragama. Pembukaan UUD 1945 menyatakan inti dari Pancasila sebagai prinsip panduan bagi bangsa, menekankan pentingnya petunjuk Ilahi dalam pembentukan Indonesia sebagai negara berdaulat. Dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tercapai berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang mencerminkan nilai-nilai transendental yang terkandung dalam Pancasila (Purnomosidi, 2019). Aspek Ilahi ini menegaskan pengakuan terhadap otoritas moral yang lebih tinggi yang memberi arahan pada kerangka hukum dan etika negara, dengan demikian membangun hubungan antara pemerintahan negara dan nilai-nilai agama.

Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm*, atau norma dasar, dari mana semua hukum memperoleh legitimasi. Ini sangat relevan dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD, yang menjamin kebebasan beragama. Prasyarat pertama Pancasila, yang menekankan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan jaminan konstitusional ini dengan menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak agama warganya (Putri et al., 2023). Hubungan ini menggambarkan bagaimana Pancasila tidak hanya memberikan dasar filosofis bagi pemerintahan tetapi juga memastikan bahwa hak individu untuk mempraktikkan keyakinan mereka dihormati dalam kerangka hukum negara. Hubungan timbal balik antara Pancasila dan kebebasan beragama semakin ditekankan oleh gagasan bahwa Pancasila mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, yang sangat penting untuk membangun masyarakat pluralis. Prasyarat kedua Pancasila, yang mendukung kemanusiaan yang adil dan beradab, melengkapi ketentuan konstitusional tentang kebebasan beragama dengan mempromosikan toleransi dan rasa hormat antar kelompok agama yang berbeda (Yusuf, 2023). Ini sangat penting di negara yang ditandai dengan keberagaman budaya dan agama yang signifikan, karena mendorong kehidupan berdampingan yang harmonis dan saling menghormati di antara warganya.

Penerimaan dan interpretasi terhadap Pancasila, ideologi negara dasar Indonesia, telah bervariasi secara signifikan di antara berbagai kelompok agama dan etnis, serta di berbagai rezim politik. Kompleksitas ini berakar pada keberagaman budaya Indonesia dan konteks historis pengembangan Pancasila. Pada awalnya, Pancasila diterima sebagai ideologi pemersatu yang dapat mengakomodasi masyarakat pluralistik Indonesia, yang mencakup beragam etnis dan agama. Para pendiri bangsa Indonesia,

termasuk Sukarno, membayangkan Pancasila sebagai sarana untuk memupuk persatuan nasional sambil menghormati keragaman negara. Namun, interpretasi terhadap Pancasila telah berkembang, terutama seiring perubahan rezim politik. Selama era Orde Baru di bawah Suharto, Pancasila sering kali digunakan sebagai alat untuk legitimasi politik dan kontrol, secara efektif menekan perbedaan pendapat dan ideologi alternatif. Pada periode ini, Pancasila didefinisikan dengan tegas untuk selaras dengan kepentingan rezim, yang menyebabkan persepsi di antara beberapa kelompok bahwa Pancasila digunakan untuk meminggirkan ekspresi Islam dan agama lainnya (Bourchier, 2019; Supramudyo et al., 2024; Arizona, 2019).

Penerimaan Pancasila di kalangan kelompok agama juga beragam. Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara historis mendukung Pancasila sebagai dasar tunggal bagi organisasi politik dan sosial. Penerimaan ini sebagian disebabkan oleh pengakuan bahwa Pancasila dapat memberikan kerangka untuk hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam (Barton et al., 2021; Burhani, 2014). Namun, ada faksi-faksi dalam komunitas Islam yang mengajukan argumen untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam lebih jelas dalam pemerintahan, mencerminkan ketegangan antara interpretasi sekuler dan religius terhadap ideologi negara (Sapsudin & Wibisono, 2024).

Pada era pasca-Suharto, lanskap ideologis kembali berubah, dengan kebangkitan nasionalisme agama. Perubahan ini ditandai dengan pengaruh yang berkembang dari kelompok Islam konservatif yang menantang interpretasi sekuler terhadap Pancasila. Partisipasi politik mahasiswa dan pemuda dari berbagai latar belakang agama juga menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengan Pancasila dengan cara yang mencerminkan identitas mereka dan aspirasi mereka untuk masyarakat yang demokratis (Sapsudin & Wibisono, 2024; Mujani & Liddle, 2009). Kontestasi ideologis seputar Pancasila semakin intens, dengan beberapa kelompok yang mendorong kembalinya interpretasi Piagam Jakarta yang lebih berorientasi Islam, yang menekankan peran hukum Islam (Bourchier, 2019; Sapsudin & Wibisono, 2024).

Berbagai rezim politik juga mempengaruhi interpretasi terhadap Pancasila. Misalnya, selama periode Reformasi setelah jatuhnya Suharto, ada dorongan untuk interpretasi Pancasila yang lebih demokratis dan pluralistik, yang bertujuan untuk memasukkan lebih banyak suara dan perspektif dalam wacana nasional (Diprose et al., 2019). Namun, perkembangan politik terkini menunjukkan kebangkitan kecenderungan yang tidak liberal, di mana Pancasila kembali digunakan untuk membenarkan praktik-praktik eksklusif terhadap kelompok minoritas dan suara yang berbeda (Diprose et al., 2019). Hal ini mencerminkan pola siklikal di mana Pancasila ditafsirkan ulang untuk melayani kepentingan mereka yang berkuasa, sering kali dengan mengorbankan pluralisme yang seharusnya dijaga.

B. Praktek Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membangun pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila, doktrin filosofis dasar Indonesia. Kerangka pendidikan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, tetapi juga untuk menanamkan penghargaan yang mendalam terhadap konteks sejarah dan prinsip-prinsip etika yang mendasari masyarakat Indonesia. Integrasi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan identitas nasional, pengembangan karakter, dan kohesi sosial di antara warga negara.

Signifikansi sejarah Pancasila ditekankan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang sejarah Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Dengan mengontekstualisasikan Pancasila dalam narasi sejarah ini, siswa dapat lebih menghargai relevansi dan penerapannya dalam masyarakat kontemporer. Misalnya, Wasino et al. menyoroti bahwa pendidikan Pancasila diarahkan untuk memahami prinsip dan etika Pancasila, yang penting untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan di kalangan warga negara (Wasino et al., 2019). Pemahaman ini lebih dikuatkan oleh Fortuna dan Khadir, yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang berakar dalam budaya Indonesia, sehingga membangun rasa identitas dan kebersamaan nasional (Fortuna & Khadir, 2022).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memfasilitasi internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang sangat penting untuk membina masyarakat yang harmonis dan demokratis. Hidayah et al. mencatat bahwa pendidikan kewarganegaraan telah berkembang untuk mencakup aspek pendidikan politik, pendidikan nilai, dan penyelesaian konflik, yang semuanya penting untuk mempromosikan cita-cita Pancasila dalam konteks multikultural (Hidayah et al., 2020). Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan pendidikan kewarganegaraan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah, memastikan bahwa siswa dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi lanskap sosial yang beragam dan kompleks.

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nasionalisme dan patriotisme juga signifikan. Nurdin menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan membina semangat nasionalisme di kalangan siswa, yang sangat penting untuk mempertahankan integritas negara (Nurdin, 2017). Hal ini didukung lebih lanjut oleh Setyowati, yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai media pembelajaran moral, memperkuat kesetiaan kepada negara dan mengembangkan pemikiran kritis (Setyowati, 2016). Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa didorong untuk terlibat aktif dalam komunitas mereka dan menegakkan prinsip keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial.

Selain mempromosikan identitas nasional, pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya perilaku etis dan tanggung jawab kewarganegaraan. Sumardjoko membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui kearifan lokal, yang memperkuat karakter dan identitas bangsa (Sumardjoko, 2018). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang Pancasila tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, membangun budaya keterlibatan kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial.

Menanamkan nasionalisme, identitas nasional, dan patriotisme melalui pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun warga negara yang kohesif dan terlibat. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai elemen dasar dalam membentuk pemahaman individu tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam negara, sehingga mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan masyarakat. Kerangka pendidikan ini sangat signifikan di masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana latar belakang yang beragam harus diselaraskan di bawah identitas nasional yang sama.

Salah satu alasan utama untuk menekankan nasionalisme dan identitas nasional dalam pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membina rasa kebersamaan di

kalangan warga negara. Setyowati menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan bertugas mempersiapkan siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan rasa kesetiaan yang kuat terhadap negara mereka, yang sangat penting dalam membangun identitas nasional yang bersatu (Setyowati, 2016). Rasa kebersamaan ini sangat penting untuk stabilitas sosial, karena mendorong individu untuk mengutamakan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan pribadi, sehingga meningkatkan kohesi sosial.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan patriotisme, yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Petrov et al. menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan patriotik pada siswa, karena orientasi ini mempengaruhi keterlibatan kewarganegaraan mereka dan rasa tanggung jawab terhadap negara (Petrov et al., 2021). Dengan membina patriotisme, pendidikan kewarganegaraan mendorong individu untuk aktif berkontribusi pada komunitas mereka dan berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan nasional, sehingga memperkuat struktur masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik warga negara tentang hak dan kewajiban mereka, yang fundamental untuk demokrasi yang berfungsi. Hasmika dan Ar berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki misi multidimensi, termasuk promosi nilai-nilai demokrasi dan pengembangan budaya kewarganegaraan, yang sangat penting untuk membina warga negara yang terinformasi dan bertanggung jawab (Hasmika & AR, 2022). Pemahaman ini memberdayakan individu untuk terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan, membela hak-hak mereka, dan mengawal pemerintah mereka, sehingga meningkatkan tata kelola demokrasi.

Selanjutnya, integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat identitas nasional sambil menghormati keberagaman. Tjandra et al. mencatat bahwa mengintegrasikan Pancasila dan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan kewarganegaraan membina rasa kebangsaan dan patriotisme di kalangan siswa, yang sangat penting untuk menjaga persatuan dalam keragaman (Tjandra et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas nasional tetapi juga mempromosikan penghormatan terhadap perbedaan budaya, sehingga meningkatkan keharmonisan sosial.

Selain membina rasa kebersamaan dan tanggung jawab, pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas masyarakat kontemporer. Subkhan et al. menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam kehidupan publik (Subkhan et al., 2023). Persiapan ini sangat penting di era yang ditandai dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat, di mana warga negara yang terinformasi lebih siap untuk mengatasi tantangan sosial dan berkontribusi pada kemajuan nasional.

Pancasila, sebagai doktrin filosofis dasar Indonesia, memegang peranan penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik melalui integrasinya dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai kompas moral, yang membimbing perilaku dan sikap individu dalam masyarakat. Pendidikan di Indonesia, khususnya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), bertujuan untuk menanamkan rasa identitas nasional, nilai-nilai demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan di kalangan siswa, sehingga membentuk generasi warga negara yang mencerminkan cita-cita tersebut.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa di Indonesia didukung oleh berbagai survei dan wawancara yang menyoroti bagaimana nilai-nilai ini diajarkan dan

dipersepsikan dalam lingkungan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pengajaran Pancasila yang efektif sangat penting untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman di kalangan siswa, terutama di sekolah dasar. Misalnya, sebuah studi oleh Nurhakim et al. menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sekolah sehari-hari secara signifikan meningkatkan sifat-sifat ini, dan mencatat pentingnya dukungan dari kepala sekolah dan guru dalam proses ini (Nurhakim et al., 2024). Temuan ini didukung oleh pengamatan bahwa pengaruh negatif dari teman sebaya dapat diminimalkan melalui bimbingan yang tepat dari pendidik.

Selain itu, pengembangan bahan ajar, seperti buku teks yang berbasis pada prinsip persatuan dalam keberagaman, terbukti memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Abdulkarim et al. membahas pembuatan buku teks pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan keadilan sosial, yang sejalan dengan ajaran Pancasila (Abdulkarim et al., 2020). Pendekatan ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum, sehingga mendorong pengembangan karakter di kalangan siswa.

Di pendidikan tinggi, sebuah studi yang dilakukan di Universitas Negeri Medan (UNIMED) menggunakan survei untuk menilai kesadaran dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kegiatan sehari-hari mereka, menunjukkan pemahaman yang jelas tentang pentingnya nilai-nilai tersebut (Panggabean et al., 2024). Penelitian ini menyoroti efektivitas metode hibrida, yang menggabungkan survei dan tinjauan pustaka, dalam mengevaluasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks universitas.

Selain itu, penggunaan buku cerita sebagai alat pendidikan juga telah dieksplorasi dalam konteks pendidikan dasar. Zakiah et al. menemukan bahwa penggunaan buku cerita bergambar secara efektif menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada siswa, dengan teknik seperti kuesioner, wawancara, dan observasi kelas untuk menilai dampak bahan ajar ini (Zakiah et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan inovatif seperti ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, internalisasi nilai-nilai Pancasila juga diteliti melalui budaya sekolah. Sebuah studi oleh Nurizka et al. menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan observasi lapangan, untuk mengeksplorasi bagaimana budaya sekolah membina kesadaran akan nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa sekolah dasar (Nurizka et al., 2020). Penelitian ini menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang mendukung dalam mempromosikan nilai-nilai ini, yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa identitas nasional dan karakter di kalangan siswa.

Integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan sangat penting untuk pembangunan karakter. Seperti yang dicatat oleh Sunaryati et al., pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam kerangka pendidikan Indonesia, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter siswa sejalan dengan nilai-nilai nasional (Sunaryati et al., 2024). Pendidikan Pancasila ditandai tidak hanya dengan penyampaian pengetahuan, tetapi juga dengan penanaman nilai-nilai moral yang membentuk kepribadian siswa (Octavia & Tirtoni, 2024). Fokus ganda ini pada pengetahuan dan karakter sangat penting, karena mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas masyarakat modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati, tanggung jawab, dan kerjasama yang dipromosikan oleh Pancasila (Rohmawati & Sutrisno, 2024).

Selain itu, peran Pancasila dalam membina kewarganegaraan demokratis ditekankan dalam berbagai studi. Mahpudz et al. menyoroti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi secara strategis diposisikan untuk mengembangkan sikap demokratis dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, dengan Pancasila sebagai kerangka panduannya (Mahpudz et al., 2022). Ini semakin didukung oleh temuan Hakim, yang menegaskan bahwa Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan membina sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk pemimpin masa depan, dengan menekankan pentingnya karakter dalam peran kepemimpinan (Hakim, 2020). Penekanan pada nilai-nilai demokrasi sangat penting, karena mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan kewarganegaraan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat mereka.

Prinsip-prinsip Pancasila juga mempromosikan rasa persatuan dan keberagaman, yang sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Seperti yang dicatat oleh Widarini dan Suterji, inisiatif Profil Pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter dengan menekankan nilai-nilai seperti kerja sama dan penghormatan terhadap keberagaman (Widarini & Suterji, 2023). Inisiatif ini sejalan dengan tujuan luas pendidikan Pancasila, yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab di kalangan siswa, mendorong mereka untuk merangkul peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan terlibat (Andriani et al., 2023).

Selain pendidikan formal, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk pengembangan karakter. Seperti yang disorot oleh Hariyadi et al., praktik terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melibatkan penerapan secara rutin dalam interaksi sehari-hari, yang membangun budaya saling menghormati dan harmoni dalam komunitas (Hariyadi et al., 2023). Penerapan praktis nilai-nilai Pancasila ini memperkuat pengetahuan teoretis yang diperoleh dalam pengaturan pendidikan, memastikan bahwa siswa menginternalisasi prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan keharmonisan dan toleransi di masyarakat yang beragam dengan membina pemahaman tentang tanggung jawab kewarganegaraan, penghormatan terhadap keberagaman, dan pentingnya kohesi sosial. Melalui kurikulum yang terstruktur dan pendekatan pedagogis yang menarik, pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menghargai kompleksitas lingkungan multikultural.

Salah satu cara utama pendidikan kewarganegaraan mempromosikan keharmonisan adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Altaany dan Abdelbary menekankan bahwa paparan terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan meningkatkan sikap toleransi dan tanggung jawab kewarganegaraan, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang kohesif dan inklusif (Altaany & Abdelbary, 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayani, yang mencatat bahwa pendidikan kewarganegaraan mendorong siswa untuk bertindak sesuai dengan cita-cita moral negara mereka, yang membina keharmonisan praktis di antara kelompok-kelompok yang beragam (Hidayani, 2022). Kerangka pendidikan seperti ini sangat penting dalam membangun rasa kebersamaan dan saling menghormati di antara individu dari latar belakang yang berbeda.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat secara aktif melawan radikalisasi dan mempromosikan pluralisme budaya. Wasino et al. berpendapat bahwa Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan harus mengadopsi pendekatan kritis yang mendorong

debat dan penerimaan argumen budaya yang beragam, dengan demikian menciptakan lingkungan solidaritas sosial dan toleransi (Wasino et al., 2019). Keterlibatan kritis ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang pluralisme tetapi juga membekali mereka dengan alat untuk secara efektif menantang ideologi ekstremis. Demikian pula, Japar et al. menyoroti pentingnya mengintegrasikan konten multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan, yang dapat membantu mengurangi prasangka dan mempromosikan pedagogi yang adil di kalangan siswa (Japar et al., 2022).

Implementasi pendidikan multikultural dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan semakin memperkuat prinsip-prinsip toleransi dan keharmonisan. Permady et al. menggambarkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai sarana untuk pendidikan multikultural, membina motivasi diri dan penghormatan di kalangan siswa dari berbagai latar belakang (Permady et al., 2023). Perspektif ini sangat penting di negara seperti Indonesia, di mana keberagaman etnis dan agama sangat kental, dan di mana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran transformasional dalam membentuk sikap inklusif (Muhtar et al., 2022).

Literasi digital dan inklusivitas adalah komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan kontemporer, terutama karena masyarakat semakin bergantung pada platform digital untuk keterlibatan dan partisipasi kewarganegaraan. Integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberdayakan siswa tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan latar belakang pembelajaran.

Literasi digital sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan kewarganegaraan di kalangan siswa, terutama generasi digital native yang sudah terbiasa dengan teknologi. Tarsidi et al. menekankan bahwa literasi digital membekali individu muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dan terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan secara efektif, sehingga mendorong rasa tanggung jawab dan partisipasi dalam proses demokrasi (Tarsidi et al., 2023). Demikian pula, Guzmán-Simón et al. menyoroti pentingnya bagi lembaga pendidikan untuk menilai dan meningkatkan kompetensi digital siswa, yang sangat penting untuk partisipasi aktif mereka dalam masyarakat (Guzmán-Simón et al., 2017). Selain itu, Saleh dan Solihin mencatat bahwa penerapan program literasi digital dalam kurikulum memiliki dampak positif pada pemahaman siswa tentang penggunaan digital yang bertanggung jawab, yang sangat penting untuk keterlibatan kewarganegaraan (Saleh & Solihin, 2023).

Inklusivitas dalam pendidikan literasi digital memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki akses ke alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk partisipasi yang efektif dalam kehidupan kewarganegaraan. Menurut Wang dan Si, perpustakaan dan lembaga akademik memainkan peran penting dalam mempromosikan inklusi digital, yang menjadi dasar bagi akses yang setara terhadap pendidikan kewarganegaraan (Wang & Si, 2024). Hal ini juga didukung oleh Murithi dan Mbaka, yang berpendapat bahwa mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dasar dapat meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan program pendidikan, sehingga mendorong inklusivitas (Murithi & Mbaka, 2022). Selain itu, karya Hilyana et al. menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan literasi digital yang mencakup berbagai jenis literasi, termasuk literasi kewarganegaraan, untuk mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas masyarakat modern (Hilyana et al., 2023).

Untuk mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidik dapat mengadopsi beberapa strategi. Misalnya, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan alat digital dapat

meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka tentang isu-isu kewarganegaraan. Pristiani et al. menyarankan bahwa menggabungkan literasi digital dengan literasi kewarganegaraan dapat meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik siswa, sehingga mempersiapkan mereka untuk partisipasi aktif dalam diskursus kewarganegaraan (Pristiani et al., 2023). Selain itu, penggunaan media pembelajaran berbasis digital yang bervariasi dapat memenuhi berbagai gaya belajar, menjadikan pendidikan kewarganegaraan lebih aksesibel dan menarik bagi semua siswa, seperti yang disoroti oleh Nuryadi dan Widiatmaka (Nuryadi & Widiatmaka, 2023).

Kurikulum juga dapat mengintegrasikan praktik literasi digital kritis yang mendorong siswa untuk menganalisis dan mengkritik konten digital, sehingga memperdalam pemahaman mereka tentang tanggung jawab kewarganegaraan di era digital. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Garcia dan Mirra, yang mendukung pengembangan literasi kewarganegaraan yang melibatkan pemuda dalam diskursus kebijakan, sehingga meningkatkan partisipasi kewarganegaraan mereka (Garcia & Mirra, 2020).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membina identitas kewarganegaraan dan agensi, yang sangat penting untuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Seperti yang dicatat oleh Warsame et al., pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk terlibat secara bermakna dalam kehidupan kewarganegaraan, yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan keseluruhan masyarakat demokratis (Warsame et al., 2023). Keterlibatan ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam, di mana pemahaman dan kolaborasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda sangat penting untuk stabilitas sosial. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam membina toleransi antar-etnis tidak bisa diremehkan. Rahayu et al. menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar berperan penting dalam mengembangkan kewarganegaraan yang baik yang ditandai dengan toleransi dan pemikiran kritis (Rahayu et al., 2024). Pendidikan dasar ini sangat penting untuk membina generasi yang menghargai keberagaman dan menerapkan inklusivitas dalam interaksi mereka.

C. Menghadapi Tantangan Modern

Pendidikan kewarganegaraan menghadapi banyak tantangan di era modern, terutama dalam beradaptasi dengan kompleksitas lanskap sosial yang berkembang pesat, yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan polarisasi politik. Meskipun tantangan-tantangan ini ada, pendidikan kewarganegaraan tetap sangat relevan karena memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang terinformasi dan terlibat yang dapat menghadapi kompleksitas ini dengan efektif.

Salah satu tantangan signifikan adalah integrasi pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan yang lebih luas. Hooghe dan Dassonneville menyoroti pentingnya strategi pembelajaran kooperatif dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat mempromosikan keterlibatan demokratis dan stabilitas (Hooghe & Dassonneville, 2011). Namun, banyak sistem pendidikan kesulitan dalam menerapkan strategi ini secara efektif, seringkali karena kurangnya sumber daya atau pelatihan untuk pendidik. Kekurangan ini dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal tentang tanggung jawab kewarganegaraan di kalangan siswa, sehingga mengurangi potensi dampak pendidikan kewarganegaraan dalam membina kewarganegaraan aktif.

Selain itu, bangkitnya teknologi digital memberikan peluang dan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan. Platform digital dapat meningkatkan keterlibatan kewarganegaraan dengan menyediakan saluran baru untuk komunikasi dan partisipasi

(Peart et al., 2022). Namun, penyebaran informasi yang salah dan konten yang terpolarisasi secara online mempersulit pemahaman siswa tentang isu-isu kewarganegaraan. Ruchliyadi et al. menekankan bahwa mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa untuk secara kritis terlibat dengan informasi yang mereka temui di dunia maya, sekaligus mempromosikan ketahanan terhadap pengaruh negatif (Ruchliyadi et al., 2018). Integrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam membedakan sumber yang kredibel dan terlibat secara konstruktif dalam diskursus kewarganegaraan.

Integrasi teknologi dalam pengajaran Pancasila, teori filosofis dasar negara Indonesia, memberikan kesempatan unik untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan sambil menghadapi tantangan seperti misinformasi dan polarisasi politik. Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang mempromosikan persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial, menjadikannya penting bagi siswa untuk memahami nilai-nilai ini dalam konteks isu-isu kontemporer. Penggunaan teknologi dapat memfasilitasi pemahaman ini melalui metode yang interaktif dan menarik, sekaligus membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas lanskap informasi digital.

Salah satu cara efektif untuk memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Pancasila adalah melalui pengembangan platform digital yang menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif. Misalnya, modul online dan aplikasi dapat dirancang untuk menyajikan prinsip-prinsip Pancasila dalam format yang digamifikasi, memungkinkan siswa untuk terlibat dengan materi secara aktif. Nurdin menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter nasional, yang dapat ditingkatkan melalui teknologi yang mendorong keterlibatan dan pemikiran kritis (Nurdin, 2015). Selain itu, penggabungan sumber daya multimedia, seperti video dan podcast, dapat membantu menggambarkan relevansi Pancasila dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik terkini, sehingga membuat konten lebih dapat dipahami oleh siswa.

Lebih lanjut, teknologi dapat memfasilitasi lingkungan pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat berdiskusi dan mendebatkan implikasi Pancasila dalam masyarakat kontemporer. Forum online dan platform media sosial dapat menjadi ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pandangan mereka dan terlibat dalam dialog konstruktif. Hal ini sejalan dengan temuan Kaumba dan Mupeta, yang menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan global dalam mendorong keterlibatan kewarganegaraan melalui pembelajaran kolaboratif (Kaumba & Mupeta, 2023). Dengan mendorong siswa untuk mengartikulasikan pemikiran mereka dan berinteraksi dengan perspektif yang beragam, pendidik dapat mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam konteks dunia nyata. Namun, tantangan yang ditimbulkan oleh misinformasi dan polarisasi politik harus diatasi agar teknologi dapat berfungsi sebagai alat konstruktif dalam pendidikan kewarganegaraan. Abiodun mencatat bahwa misinformasi secara signifikan mempengaruhi komunikasi politik dan keterlibatan kewarganegaraan, yang menyebabkan penurunan kepercayaan publik dan pengambilan keputusan yang kurang informasi (Abiodun, 2024). Untuk melawan ini, pendidik dapat memasukkan pelatihan literasi digital dalam kurikulum, membekali siswa dengan keterampilan untuk secara kritis mengevaluasi sumber informasi. Nuryadi dan Widiatmaka menekankan perlunya memperkuat literasi kewarganegaraan melalui literasi digital, terutama di era di mana siswa semakin terpapar pada berita palsu di media sosial (Nuryadi & Widiatmaka, 2023). Dengan mengajarkan siswa bagaimana membedakan informasi yang kredibel dari misinformasi, pendidik dapat

memberdayakan mereka untuk terlibat dalam diskusi yang berinformasi tentang Pancasila dan relevansinya.

Selain strategi-strategi ini, penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan keterlibatan kewarganegaraan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip Pancasila. Pendidik dapat membimbing siswa untuk membuat kampanye yang menyoroti nilai-nilai Pancasila, mendorong mereka untuk menggunakan platform digital mereka untuk aksi kewarganegaraan yang positif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip Pancasila tetapi juga memberdayakan siswa untuk menjadi peserta aktif dalam komunitas mereka. Seperti yang disoroti oleh Ballard, program-program pemuda yang mengarahkan frustrasi mereka ke dalam keterlibatan kewarganegaraan dapat melibatkan siswa secara efektif (Ballard, 2014). Dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan aksi kewarganegaraan, pendidik dapat membantu siswa menghubungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan pengalaman hidup mereka.

Selain itu, peran pendidik dalam menavigasi tantangan misinformasi dan polarisasi tidak bisa dianggap remeh. Guru harus dibekali dengan alat dan pelatihan yang diperlukan untuk membimbing siswa melalui kompleksitas informasi digital. Ini termasuk memahami dinamika misinformasi dan mampu memfasilitasi diskusi yang mempromosikan pemikiran kritis dan dialog yang penuh rasa hormat. Seperti yang disarankan oleh Cook, pendidik perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti untuk melawan misinformasi secara efektif (Cook, 2019). Dengan menciptakan lingkungan kelas yang menghargai penyelidikan dan keterlibatan kritis, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menavigasi lanskap digital secara bertanggung jawab

Selain itu, sifat identitas kewarganegaraan yang terus berkembang di masyarakat yang beragam memerlukan peninjauan kembali pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Hurtado menunjukkan bahwa meningkatnya keberagaman demografis di kalangan siswa mengharuskan pendidikan kewarganegaraan untuk beradaptasi dan mengatasi ketakutan serta konflik yang mungkin timbul dari pandangan dunia yang berbeda (Hurtado, 2019). Adaptasi ini melibatkan pembuatan kurikulum yang inklusif dan mencerminkan pengalaman beragam siswa, dengan demikian menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Signifikansi sejarah BPUPKI dan Pancasila dalam proses pembentukan negara Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. BPUPKI meletakkan dasar bagi kemerdekaan Indonesia, membangun rasa persatuan dan identitas nasional di tengah keberagaman penduduk. Perumusan Pancasila sebagai ideologi dasar negara merupakan momen penting yang mencerminkan kebutuhan untuk merekonsiliasi keberagaman budaya, agama, dan etnis Indonesia dalam suatu kerangka yang bersatu. Lima prinsip Pancasila—Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—telah menjadi kompas moral dan ideologis, yang membimbing bangsa ini melalui tahun-tahun pembentukannya dan seterusnya. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan warga negara. Dengan mengontekstualisasikan Pancasila dalam narasi sejarah Indonesia, pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami pentingnya toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural.

Hal ini menumbuhkan rasa identitas nasional, patriotisme, dan tanggung jawab kewarganegaraan, yang sangat penting untuk mempertahankan kohesi sosial dan keterlibatan demokratis. Namun, seiring Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan polarisasi politik yang semakin meningkat, pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi agar tetap relevan.

Kebutuhan akan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif dan inklusif semakin mendesak. Dalam dunia yang berkembang pesat, pendidik harus mengatasi kompleksitas literasi digital, disinformasi, dan pengalaman beragam siswa. Pendidikan kewarganegaraan harus berkembang untuk mengintegrasikan strategi pengajaran inovatif yang menekankan berpikir kritis, literasi digital, dan inklusivitas. Dengan cara ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membekali siswa dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kontemporer sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila tetap menjadi ideologi hidup yang terus membentuk identitas Indonesia. Prinsip-prinsip pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial sangat penting untuk mempertahankan persatuan nasional di tengah keberagaman negara ini. Namun, tantangan yang terus ada adalah menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam pendidikan kewarganegaraan. Meskipun penting untuk mempertahankan nilai inti Pancasila, pendidik juga harus mengatasi kebutuhan yang berkembang dari masyarakat yang terglobalisasi dan didorong oleh teknologi.

Warisan BPUPKI dan relevansi Pancasila yang abadi menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional yang kohesif dan inklusif. Saat Indonesia menavigasi kompleksitas dunia modern, prinsip-prinsip Pancasila harus terus membimbing bangsa ini, memastikan bahwa warganya tetap bersatu, toleran, dan berkomitmen pada cita-cita keadilan dan demokrasi. Tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk beradaptasi dengan dinamika yang berubah ini sambil tetap setia pada nilai-nilai dasar yang telah membentuk identitas Indonesia sejak kemerdekaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, I. (2020). Understanding indonesia's role in the 'asean outlook on the indo-pacific': a role theory approach. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293-305.
- Agussalim, A., Hartoyo, H., & Wahyuni, W. (2023). Pancasila economy: study theory and implementation in economic education in indonesia. *Eklektik Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 180.
- Ali, Y. (2022). Strengthening nationalism and love of homeland in the global era through citizenship education as national defense education. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2).
- Anwar, D. (2020). Indonesia and the asean outlook on the indo-pacific. *International Affairs*, 96(1).
- Barton, G., Yilmaz, İ., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in indonesia. *Religions*, 12(8), 641.
- Boonen, J., Pedersen, E. F., & Hooghe, M. (2017). The Effect of Political Sophistication and Party Identification on Voter-party Congruence. A Comparative Analysis of 30 Countries. *Journal of Elections Public Opinion and Parties*, 27(3), 311-329.

- Dewantara, J., Suhendar, I., Rosyid, R., & Atmaja, T. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5).
- Goh, D. P. S. (2007). From Colonial Pluralism to Postcolonial Multiculturalism: Race, State Formation and the Question of Cultural Diversity in Malaysia and Singapore. *Sociology Compass*, 2(1), 232–252.
- Izza, F. (2022). Pancasila values in javanese kenduren tradition as the implementation of religious moderation in tulungagung. *Annual International Conference on Islamic Education for Students*, 1(1).
- Jayanti, M. and Sowiyah, S. (2023). Implementation of pancasila ideology in indonesian educational leadership: a literature review. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(06).
- Kusuma, J. and Susilo, S. (2020). Intercultural and religious sensitivity among young indonesian interfaith groups. *Religions*, 11(1), 26.
- Labobar, K. (2024). Damai model as a prototype of religious moderation. *Evangelikal Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 8(1), 76.
- Mulyana, D. (2024). The role of citizenship education management in facing the challenges of multiculturalism. *esaprom*, 3(01), 51-58. <https://doi.org/10.58471/esaprom.v3i01.4083>.
- Razuni, G. (2023). Bung karno's political thought according to pancasila: a study of bung karno's speech on june 1, 1945, and the president soekarno/bung karno's pancasila course throughout 1958-1959. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(2), 223. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.50119>.
- Rosa, Y. and Nawawi, E. (2023). School ecosystem based on the implementation of pancasila values and diversity in sman 5 Palembang. *Ensiklopedia Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Saburai*, 3(01), 48-55. <https://doi.org/10.24967/esp.v3i01.2109>.
- Sulistiyono, S., Amaruli, R., & Sarji, S. (2023). Writing 'anniversary' in historical perspective: a way to find identity. *Indonesian Historical Studies*, 7(1), 47-61. <https://doi.org/10.14710/ihis.v7i1.17935>.
- Wibowo, A. (2023). Konversi yesuit indonesia pada sukarnoisme: pemihakan pada pancasila. *Archipel*, 106, 179-203. <https://doi.org/10.4000/11wu9>.
- Yusuf, Y. (2023). The role of pancasila in view from the sociology of religion in the globalisation era. *Journal of Business Social and Technology*, 4(1), 87-97.
- Zuhdi, M. and Sarwenda, S. (2020). Recurring issues in indonesia's islamic education: the needs for religious literacy. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 5(01), 1-13.